

BAB II

LANDASAN TEORI

Prinsip konservatisme telah menjadi konsep pencatatan akuntansi yang diterapkan secara luas dalam beberapa dekade belakangan ini. Sterling (1970) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip yang paling berpengaruh dalam valuasi akuntansi. Prinsip ini menekankan untuk memilih alternatif pencatatan akuntansi yang memiliki kemungkinan terkecil untuk meng-*overstate* asset dan pendapatan. Prinsip yang telah menjadi standar pencatatan utama pada tiga dekade awal abad ke-20 diterapkan untuk mengimbangi optimisme manajemen serta kecenderungan mereka dalam meng-*overstate* laporan keuangan. Para praktisi akuntansi mempercayai bahwa dengan menerapkan prinsip ini, kecil kemungkinan para pengguna laporan keuangan mengalami *misleading* dalam pengambilan keputusannya. Namun, prinsip ini terus menuai banyak kritik dan kontroversi, bahkan di kalangan para praktisi dan pembuat standar akuntansi itu sendiri (Swaard, Rosencratz dan Narayanan, 2005).

Saat ini, perusahaan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk dapat memberikan laporan keuangan yang lebih andal. Beberapa pihak, termasuk diantaranya FASB (regulator akuntansi Amerika Serikat) menyarankan untuk meninggalkan prinsip konservatisme di dalam pelaporan akuntansi perusahaan agar dapat memberikan laporan keuangan yang tidak bias.

Selain itu, pada tahun belakangan ini, para pelaku pasar modal menghendaki pencatatan nilai aset perusahaan yang lebih dekat dengan nilai pasarnya daripada nilai bukunya. Permintaan para pelaku pasar tersebut semakin menurunkan pamor penerapan prinsip konservatisme. Selain itu, konservatisme pun dinilai tidak lagi sejalan dengan tujuan standar akuntansi modern yang menghendaki standar akuntansi yang dapat memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang (*future-oriented*), sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh prinsip konservatisme.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menggali berbagai kelemahan dalam penerapan prinsip ini, diantaranya, Pennman dan Zhang (2002) yang menemukan bahwa penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan akuntansi memberikan kualitas *earning* yang rendah. Selain itu, Basu (1997) menemukan bahwa penerapan prinsip konservatisme telah menimbulkan perbedaan rentang waktu pengakuan *bad news* dan *good news* di dalam nilai *earning* yang dilaporkan perusahaan, dimana *bad news* akan terefleksikan di dalam nilai *earning* perusahaan lebih cepat dibandingkan *good news*. Contohnya, *unrealized loss* umumnya akan lebih cepat terefleksikan di dalam nilai *earning* perusahaan daripada *unrealized gain*.

Perbedaan pengakuan *good news* dan *bad news* tersebut membuat perusahaan yang konservatif cenderung melaporkan nilai asset yang lebih kecil daripada nilai yang seharusnya (*understatement asset*). Hal ini dapat menyebabkan para pengguna laporan keuangan perusahaan mengambil kesimpulan yang salah mengenai kondisi perusahaan dan membuat mereka mengambil keputusan investasi yang tidak tepat. Latar belakang tersebut membuat FASB (regulator akuntansi Amerika Serikat) menyimpulkan semakin tinggi penerapan prinsip konservatisme yang dilakukan perusahaan maka semakin besar asimetri informasi antara pembuat laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan dan hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi *uninformed investor* dan pengguna laporan keuangan lainnya.

II.1 Konsep Dasar Konservatisme

II.1.1 Definisi Konservatisme

Konservatisme dapat diartikan sebagai preferensi akuntan untuk memilih metode akuntansi tertentu yang menghasilkan pencatatan nilai modal yang lebih kecil. Bliss (1924) mendefinisikan konservatisme sebagai *anticipate no profit but anticipate all losses* (Watts, 2003, p.208). Yakni, prinsip yang menekankan pada pencatatan keuntungan ketika telah tersedia cukup bukti atas pendapatan yang dapat menghasilkan keuntungan tersebut dan segera mengakui kerugian.

FASB menjelaskan definisi konservatisme di dalam SFAC no.2 tahun 1980 sebagai reaksi yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dalam perusahaan untuk meyakinkan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat di dalam bisnis perusahaan sudah cukup dipertimbangkan.

Definisi konservatisme di atas masih samar dalam menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktek akuntansi konservatif yang diterapkan oleh para akuntan. Beberapa buku teks akuntansi memberikan penjelasan yang lebih deskriptif mengenai definisi konservatisme. Schroeder (2003) menjelaskan konservatisme sebagai pilihan manajemen perusahaan ketika berada dalam keragu-raguan untuk menggunakan metode pencatatan yang memiliki kemungkinan terkecil untuk meng-*overstate* asset dan laba yang dilaporkan. Wolk dan Tearney (2000) menyebutkan bahwa konservatisme merupakan preferensi terhadap metode-metode akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan, sementara nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, atau menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.

Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme merupakan kecenderungan akuntan untuk mempersyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi dalam mengakui *good news* sebagai keuntungan daripada *bad news* sebagai kerugian. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi perbedaan tingkat verifikasi antara *bad news* dan *good news* di dalam perusahaan maka semakin konservatif laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan.

Implikasi dari definisi konservatisme adalah dalam prakteknya, akuntansi konservatif akan mengakui seluruh biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Givoly dan Hayn (2000), definisi konservatisme tersebut mengabaikan pentingnya dimensi waktu dari konservatisme akuntansi. Pelaporan konservatif dalam satu periode mengimplikasikan pelaporan nonkonservatif dalam beberapa periode berikutnya. Sebagai contoh, membebaskan sepenuhnya suatu aset yang memiliki kemungkinan manfaat ekonomis di masa yang akan datang akan mengurangi jumlah laba (laba akan lebih konservatif) dalam periode pengeluaran biaya. Sebaliknya, laba pada periode berikutnya akan menjadi kurang konservatif (misal,

overstated) karena biaya yang berkaitan telah dibebankan sepenuhnya dalam periode sebelumnya.

Givoly dan Hayn (2000) dan Watts (2003) menunjukkan perspektif jangka panjang terhadap konservatisme. Givoly dan Hayn (2000) mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan. Watts (2003) menyatakan konservatisme menyebabkan understatement terhadap laba dalam *current period* yang dapat mengarahkan pada overstatement terhadap laba pada periode-periode berikutnya, sebagai akibat understatement terhadap biaya pada periode tersebut. Secara ringkas, mereka menyatakan bahwa konservatisme akuntansi menyebabkan understatement yang persisten dari laba laporan kumulatif dan aset bersih sepanjang periode pelaporan.

II.1.2 Sejarah Konservatisme

Konservatisme telah mempengaruhi pelaporan dan pencatatan akuntansi sejak beberapa abad yang lalu. Penndorf (1930) menyatakan bahwa pencatatan historis dalam perdagangan antar persekutuan pada abad ke 15 di Eropa Tengah menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi di abad tersebut telah menerapkan praktek konservatisme (Basu, 1997, p.8).

Prinsip konservatisme menjadi semakin menonjol pada tiga dekade awal abad ke-20. Hellman (2007) menyatakan bahwa hingga saat ini, prinsip konservatisme masih menjadi prinsip yang paling berpengaruh pada praktek akuntansi konvensional. Prinsip ini diyakini mampu mencegah terjadinya kerugian akibat optimisme manajemen yang berlebihan yang mengakibatkan tingginya kecenderungan para manajer tersebut untuk meng-*overstate* nilai aktiva bersih dan laba perusahaan. Para akuntan mempercayai bahwa dengan menggunakan metode penilaian yang menghasilkan nilai aktiva bersih dan laba terkecil, maka semakin kecil kemungkinan para pengguna laporan keuangan mengalami *mislead*.

Namun, praktek konservatisme menimbulkan sebuah permasalahan yakni akuntansi konservatif membuat pencatatan *asset* mengalami *understatement*,

kewajiban menjadi *overstatement* serta pengakuan pendapatan yang terlalu lambat dan pengakuan biaya yang terlalu cepat (Watts, 2003). Dengan berbagai kritik yang mengemuka atas penerapan prinsip ini, konservatisme tetap menjadi salah satu prinsip yang paling berpengaruh dalam akuntansi konvensional (Hellman, 2007). Kebutuhan para akuntan akan akuntansi konservatif berkaitan dengan dapat diandalkannya pelaporan keuangan yang menerapkan konservatisme. Sangat kecil kemungkinan akuntan dan auditor menghadapi tuntutan hukum dari para pengguna laporan keuangan akibat laporan keuangan yang terlalu konservatif.

Bagaimanapun, saat ini para pelaku pasar semakin menghendaki pelaporan keuangan berdasarkan nilai pasar dan bukan nilai historis. Keinginan para pelaku pasar tersebut telah diakomodir oleh standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) dengan mempersyaratkan pembaruan atas penilaian akun-akun pada neraca atas nilai pasarnya setiap pelaporan kuartalan. Peraturan baru yang diterapkan IASB tersebut telah membuat praktek konservatisme mengalami kemunduran.

Berkaitan dengan tujuan penyesuaian standar akuntansi di Indonesia dengan standar akuntansi Internasional, konservatisme menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh para pembuat standar akuntansi di Indonesia. Penerapan prinsip konservatisme yang semakin dibatasi dan ditinggalkan oleh standar akuntansi Internasional (IFRS) membuat PSAK pun harus menerapkan perlakuan yang serupa terhadap prinsip konservatisme agar sejalan dengan IFRS.

II.1.3 Konservatisme dalam PSAK

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Pilihan metode pencatatan tersebut cenderung menimbulkan laporan laba perusahaan yang konservatif, karena akuntan akan cenderung memilih metode pencatatan yang menghasilkan nilai aktiva bersih dan laba perusahaan yang terkecil. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam

PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif di antaranya adalah:

- a. PSAK No.14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu dari metode : FIFO (*first in first out*), LIFO (*last in first out*) dan rata-rata tertimbang (*weighted average*). Dimana LIFO dianggap menghasilkan nilai laba yang lebih konservatif dibandingkan metode lainnya.
- b. PSAK No.16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.
- c. PSAK No. 17 tentang akuntansi penyusutan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari metode penyusutan yang ditetapkan untuk mengalokasikan aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan perusahaan adalah :
 - I. Berdasarkan Waktu
 - a. Metode Garis Lurus (*straight line method*)
 - b. Metode Jumlah Angka Tahun (*sum of the year digit method*)
 - c. Metode Saldo Menurun/ Saldo Menurun Ganda (*Double Declining method*)
 - II. Berdasarkan Penggunaan
 - a. Metode Jam Jasa (*service hours method*)
 - b. Metode Jumlah Unit Produksi (*productive output method*)
 - III. Berdasarkan Kriteria Lainnya
 - a. Metode Annuitas (*annuity method*)

b. Sistem Persediaan (*Inventory System*)

- d. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara andal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

II. 1.4 Konservatisme Akuntansi dalam IFRS

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional, IFRS fokus pada pencatatan yang lebih relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai *judgement*. Dalam hal ini, kebijakan yang ditetapkan IASB (*International Accounting Standard Board*) tersebut menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas penerapan akuntansi konservatif secara konsisten dalam pelaporan keuangan berdasarkan IFRS (Hellman, 2007).

Beberapa poin di bawah ini akan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif yang konsisten dalam IFRS :

- a. Dalam kerangka konseptual IFRS yang dipublikasikan IASC (*International Accounting Standard Committee*) tahun 1989 dan diadopsi oleh IASB tahun 2001 penggunaan pelaporan keuangan dengan pendekatan laporan keuangan yang telah digunakan sejak lama dalam akuntansi konvensional digantikan dengan pendekatan neraca. Dalam pendekatan baru tersebut, penekanan prinsip akuntansi yang digunakan tidak lagi *matching cost against revenue*, namun penentuan, pengakuan dan pengukuran nilai asset serta kewajiban dengan tepat. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat maka pendapatan (*revenue*) dapat dihitung berdasarkan peningkatan nilai aktiva atau penurunan nilai utang dan

beban dapat dihitung berdasarkan penurunan nilai aktiva atau peningkatan nilai utang. Pada kondisi diketahuinya nilai pasar dari aktiva dan utang yang dimiliki perusahaan, maka pengukuran nilai aktiva dan utang tersebut didasarkan pada nilai pasarnya. Dalam hal ini, IFRS mengeluarkan peraturan baru di tahun 2005 yang diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan publik di Swedia. Peraturan tersebut mempersyaratkan perusahaan untuk memperbarui pengukuran akun-akun di neraca berdasarkan nilai pasarnya di setiap laporan kuartalan (Swaard, Rosencratz dan Narayanan, 2005). Penerapan regulasi baru tersebut menyisakan sedikit ruang bagi praktek konservatisme di bawah standar IFRS (Hellman, 2007).

b. IAS 11 (*Zero Profit Recognition for fixed-Price Contracts*)

Versi terbaru dari IAS 11 mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai penggunaan metode POC (*Percentage of Completion*) untuk pengakuan atas pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode CC (*Completed Contract*). Hellman (2007) menyatakan metode CC dinilai lebih konservatif dibandingkan metode POC karena dalam metode CC nilai keuntungan yang dapat diakui perusahaan akan mengalami *Understatement* selama proses kontrak dan akan mengalami *overstatement* setelah kontrak selesai. Hal ini disebabkan, perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan dari kontrak konstruksi tersebut setelah proses konstruksi selesai. Sementara, dalam metode POC, perusahaan dapat mengakui pendapatan berdasarkan estimasi persentase penyelesaian kontrak pada tanggal neraca.

c. IAS 12 (*Deferred Tax Asset*)

IAS 12 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1998 mengatur mengenai pengakuan *deferred tax asset* pada neraca jika mungkin (*probable*) terdapat *future taxable profit*. Sebelum dikeluarkannya IAS 12 tersebut, *deferred tax asset* tidak diakui di dalam neraca karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan *taxable profit* di masa yang akan datang. Pemberlakuan efektif atas IAS 12 tersebut merepresentasikan perlakuan akuntansi yang kurang konservatif (Hellman, 2007).

d. IAS 16 (*Property, Plant and Equipment*)

IAS 16 mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau metode revaluasi. Metode biaya merupakan metode yang telah lama digunakan dalam akuntansi konvensional, sementara metode revaluasi yang mensyaratkan perusahaan untuk memperbarui nilai aktiva secara periodic atas nilai pasarnya dinyatakan sebagai metode yang kurang konservatif (Swaard, Rosencratz dan Narayanan, 2005). Dalam metode revaluasi ini, perusahaan dapat mengakui peningkatan nilai aktiva sebagai penambahan atas modal atau peningkatan nilai pendapatan jika penurunan nilai aktiva pada periode sebelumnya telah diakui sebagai biaya.

e. IAS 38 (*Capitalisation of Development Cost*)

IAS 38 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisinya yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2004. Berdasarkan IAS 38, aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum diberlakukannya standar ini, pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi atas biaya pengembangan. Standar ini merepresentasikan regulasi akuntansi yang kurang konservatif.

II.2 Implikasi Konservatisme

Praktek konservatisme memberikan dampak terhadap nilai *earning* dan aktiva bersih yakni akuntansi konservatif akan menghasilkan nilai laba dan aktiva bersih perusahaan yang lebih rendah. Hal tersebut timbul sebagai akibat dari karakteristik konservatisme yang merefleksikan *bad news* lebih cepat dibandingkan *good news*.

Berbagai studi telah dilakukan oleh para peneliti akuntansi dalam menganalisis setiap implikasi dari praktek konservatisme. Penelitian mengenai konservatisme diawali oleh Watts dan Zimmerman (1986), Watts (1993) dan Basu (1995). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa bias konservatisme timbul akibat adanya pengaruh pengontrakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.

Basu (1997) kemudian mengembangkan penelitian yang telah dilakukannya pada tahun 1995 untuk menganalisis dampak dari konservatisme. Ia menguji argumentasinya bahwa konservatisme menghasilkan nilai *earning* yang lebih cepat merefleksikan *bad news* daripada *good news*. Hal tersebut menyiratkan bahwa terdapat perbedaan sistematis antara periode pengakuan *bad news* dan *good news* di dalam nilai *earning* yang berpengaruh terhadap persistensi nilai *earning* tersebut. Dalam penelitiannya ini, Basu mengembangkan metode pengukuran *return-earning fixed coefficient model* untuk menguji argumentasinya.

Lebih jauh lagi, Basu memperlihatkan konservatisme sebagai sebuah mekanisme pencatatan akuntansi yang menyebabkan terjadinya *asymmetric timeliness of earning* yakni nilai *earning* lebih sensitive serta lebih cepat merefleksikan *bad news* daripada *good news* yang dialami perusahaan. Karakteristik konservatisme tersebut menyebabkan nilai laporan *earning* konservatif cenderung lebih sensitif terhadap informasi publik yang buruk (*bad news*) dibandingkan sebaliknya (*good news*). Dalam hal ini, nilai *earning* diprediksi akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan *bad news* dibandingkan dengan *good news*.

Untuk menganalisis hubungan antara *earning* dengan *bad news* dan *good news*, Basu menggunakan *return* saham perusahaan untuk menangkap pengaruh kedua jenis berita tersebut terhadap nilai *earning* yang dilaporkan perusahaan. Dalam hal ini, *Positive return* menjadi proksi dari *good news* dan *negative return* menjadi proksi dari *bad news*. Variabel *return* saham perusahaan yang digunakan oleh Basu untuk mencerminkan *good news* dan *bad news* diperkuat oleh riset sebelumnya yang dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) yang berargumen bahwa harga saham mencerminkan informasi mengenai perusahaan yang diperoleh investor dari berbagai sumber selain laporan keuangan, pergerakan harga saham mendahului nilai *reported earning*.

Kenaikan harga saham perusahaan menggambarkan sentimen investor terhadap kondisi perusahaan. Dengan berbagai informasi yang diterima, para investor berekspektasi kondisi perusahaan akan semakin *profitable* dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar bagi mereka. Dalam hal ini, informasi

yang diterima oleh para investor tersebut merupakan *good news* yang tercermin dalam kenaikan harga saham dan *return* saham yang positif. Sebagai contoh, para investor memperoleh informasi dari luar perusahaan bahwa perusahaan sedang menanamkan investasinya pada sebuah proyek yang memiliki nilai NPV yang positif. Proyek tersebut menjanjikan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini tentunya merupakan kabar baik (*good news*) bagi para investor dan membentuk sentimen positif investor terhadap perusahaan yang tercermin melalui kenaikan harga saham perusahaan. Namun, keuntungan atas proyek dengan NPV yang positif tersebut belum terealisasi sehingga, dengan diterapkannya prinsip konservatisme oleh perusahaan maka *good news* tersebut belum tercermin pada nilai *reported earning*.

Sebaliknya, ketika investor menerima berita yang menginformasikan bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi yang buruk dan akan berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan, hal tersebut akan segera tercermin pada menurunnya harga dan *return* saham perusahaan yang negatif. Sementara, dengan diterapkannya prinsip konservatisme oleh perusahaan, *bad news* tersebut juga akan segera tercermin dengan menurunnya nilai *reported earning*. Sebagai contoh, ketika terjadi kenaikan mata uang dollar, perusahaan yang memiliki hutang luar negeri dalam bentuk dollar harus menanggung kerugian atas kenaikan kurs tersebut. Meskipun belum terealisasi, kerugian tersebut akan segera tercermin pada laporan keuangan konservatif dan akan menyebabkan sentimen negatif para investor di bursa saham serta mendorong terjadinya penurunan harga dan *return* saham perusahaan.

Dari penjelasan di atas, terdapat dugaan bahwa penerapan konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan menyebabkan nilai *earning* lebih sensitive serta lebih cepat menggambarkan *bad news* (*negative return*) dibandingkan *good news* (*positive return*). Hasil dari pengujian hipotesis tersebut akan menunjukkan *earning* lebih sensitif dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan *bad news* dibandingkan *good news* jika nilai β untuk sampel dengan *bad news* lebih tinggi dibandingkan sampel *good news*.

Penelitian mengenai konservatisme juga dikembangkan oleh para ahli lainnya, di antaranya Givoly dan Hayn (2000) yang mendefinisikan konservatisme

sebagai pemilihan metode akuntansi yang menghasilkan nilai *earning* terendah dengan memperlambat pengakuan keuntungan, mempercepat pengakuan biaya serta menggunakan penilaian aktiva terendah dan biaya terbesar. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan pengukuran konservatisme berbasis akrual.

Pengukuran konservatisme lainnya dikembangkan oleh Beaver dan Ryan (2000), mereka menggunakan model pengukuran perbandingan nilai buku dan nilai pasar dari aktiva bersih perusahaan. Penelitian ini menguji argumentasi bahwa konservatisme menyebabkan nilai buku dari aktiva bersih perusahaan akan lebih rendah dari nilai pasarnya secara konsisten.

Ketiga model pengukuran konservatisme yang dikembangkan Basu (1997), Givoly dan Hayn (2000) dan Beaver dan Ryan (2000) yang menjadi dasar pengukuran dalam pengembangan penelitian konservatisme selanjutnya. Salah satunya adalah penelitian yang dikembangkan oleh Watts dan La Fond (2008) yang menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Basu (1997) untuk menguji apakah konservatisme yang menimbulkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder perusahaan lainnya atau sebaliknya, asimetri informasi yang mendorong praktek konservatisme.

Penelitian yang akan dikembangkan kali ini dimotivasi oleh penelitian yang dilakukan Basu (1997) mengenai terjadinya *asymmetric timeliness of earnings* dari praktek konservatisme. Dengan menggunakan berbagai data dari perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia, penelitian ini hendak menguji apakah terjadi praktek konservatisme di Indonesia dengan melihat adanya perbedaan sistematis dalam pengakuan *bad news* dan *good news* di dalam nilai *earning* yang dilaporkan perusahaan. Pembahasan lebih detail mengenai pengembangan penelitian ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Dari berbagai studi literatur yang ada, tampak bahwa konservatisme benar-benar eksis dan diterapkan oleh banyak industri di negara-negara di dunia. Konservatisme pun diukur dalam berbagai metode, mulai dari perbandingan antara nilai buku dengan nilai pasar seperti yang dilakukan Beaver dan Ryan (2000), hingga perbedaan respon antara *positive* dan *negative return* oleh Basu (1997). Untuk kasus Indonesia, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa

konservatisme juga diterapkan di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2008) dan wydia (2004).

Seperti halnya penelitian sebelumnya, studi ini akan membuktikan apakah konservatisme diterapkan di Indonesia. Dalam analisa tersebut, studi ini mengacu pada penelitian Basu (1997) mengenai perbedaan rentang waktu pengakuan *bad news* dan *good news* dalam kondisi pelaporan yang konservatif.

H₁: Nilai *earning* lebih sensitif dalam merefleksikan *bad news* dari *good news* dalam kondisi pelaporan konservatif

II.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi

Diterapkannya prinsip konservatisme dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor pengontrakan, biaya hukum serta proses politik. Pada sub bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam mengenai berbagai faktor yang mendorong diterapkannya konservatisme akuntansi tersebut.

II.2.1 Pengontrakan (*contracting*)

Penjelasan pengontrakan sebagai pendorong timbulnya praktek konservatisme merupakan sumber yang paling dahulu muncul dan memiliki argumentasi yang telah berkembang dengan sempurna. Penjelasan pengontrakan tersebut didasarkan pada praktek akuntansi dan pengawasan manajemen yang telah lama dijalankan, sementara penjelasan mengenai penentu konservatisme lainnya didasarkan pada fenomena akuntansi yang baru berkembang beberapa tahun terakhir.

Penjelasan pengontrakan ini secara umum sangat erat kaitannya dengan teori keagenan (*agency theory*) dimana pada prakteknya, para pemilik perusahaan mewakilkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen yang ditunjuknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar manajemen dapat mengatur perusahaan hingga mencapai kinerja yang optimal untuk memberikan manfaat serta keuntungan sebesar-besarnya kepada pemilik perusahaan. Kinerja yang optimal ditunjukkan dengan perolehan keuntungan yang besar, harga saham perusahaan yang tinggi

dan pertumbuhan bisnis perusahaan yang berkelanjutan. Manajemen akan memperoleh insentif lebih besar jika mereka mampu mencapai kinerja perusahaan yang optimal yang dapat terlihat diantaranya melalui laporan keuangan perusahaan yang mencatat keuntungan yang besar.

Pemberian insentif kepada manajemen yang didasarkan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan manipulatif. Yaitu dengan membesar-besarkan keuntungan yang diperoleh serta asset yang dimiliki perusahaan dan mengecilkan jumlah kerugian dan kewajiban yang harus ditanggung perusahaan, agar manajemen dapat memperoleh insentif yang besar. Tindakan manajemen tersebut, pada akhirnya dapat mengorbankan kesejahteraan pemilik perusahaan bahkan mengorbankan nilai perusahaan itu sendiri.

Watts (2003) memberikan penjelasan secara terperinci mengenai teori keagenan serta kaitannya dengan pengontrakan melalui dua atribut pengukuran akuntansi, yaitu :

a. *Timeliness*

Kontrak yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan, dimana manajer maupun pihak lain di dalam perusahaan berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan mengorbankan nilai perusahaan maupun kesejahteraan pihak lainnya. Kontrak antara pihak-pihak terkait tersebut dilakukan dengan memasukkan biaya yang diperlukan untuk menyelaraskan pemberian insentif bagi pihak yang terlibat kontrak dengan tujuan maksimisasi nilai perusahaan.

Beberapa contoh kontrak yang dibuat untuk mengurangi biaya keagenan, antara lain kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditor, kontrak kompensasi manajemen, dan kontrak kepegawaian. Pihak-pihak yang terkait di dalam kontrak, umumnya menghendaki adanya pengukuran kesesuaian kinerja dengan kontrak yang telah ditetapkan tepat pada waktunya (*timely measure*). Hal tersebut, mendorong efektivitas pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi kepada manajemen, karena tindakan yang dilakukan manajemen yang berpengaruh terhadap nilai

perusahaan diukur kesesuaiannya dengan kontrak yang telah ditetapkan pada periode dimana tindakan tersebut dilaksanakan. Lebih jauh, *timely measure* menurunkan kemungkinan manajemen memanfaatkan masa jabatannya yang singkat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh : Manajer akan mengacuhkan *future positive NPV project* yang dapat menghasilkan *earning* negatif saat ini, karena keuntungan dari proyek tersebut baru diperhitungkan pada periode setelah masa jabatannya berakhir.

b. *Verifiability*

Beberapa informasi yang berguna untuk penilaian kinerja yang terkait di dalam kontrak terkadang tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Sebagai contoh, informasi mengenai ekspektasi peningkatan arus kas perusahaan di masa yang akan datang karena adanya pengembangan produk merupakan hal yang berguna untuk evaluasi kinerja manajemen serta pemberian kompensasi atas kinerjanya. Namun, ekspektasi peningkatan arus kas perusahaan tersebut hanyalah sebuah estimasi dan tidak ada yang dapat memastikan kepastiannya di masa yang akan datang. Verifikasi ataupun kecukupan bukti merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memperkuat kontrak tersebut di depan hukum. Oleh karena itu, nilai *earning* atau estimasi arus kas di masa yang akan datang yang tidak dapat diverifikasi perolehannya, tidak dimasukkan ke dalam kontrak.

Sementara itu, ketika perusahaan memiliki ekspektasi nilai arus kas negatif di masa yang akan datang dan tidak terikat dengan kontrak maka tidak ada konsekuensi hukum untuk *future loss* tersebut. Atau dengan kata lain, tidak diperlukan verifikasi yang tinggi terhadap pengakuan *loss* seperti yang diperlukan terhadap pengakuan *gain*.

Terdapatnya perbedaan tingkat verifikasi antara pengakuan *gain* dan *loss* tersebut terjadi karena adanya perbedaan imbalan yang dapat diperoleh para pihak terkait dari kontrak yang telah disepakati. Sebagai contoh, dalam kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditor, kreditor tidak memiliki kompensasi tambahan dari semakin besarnya nilai aktiva bersih perusahaan, yang menjadi kepentingan mereka hanyalah perusahaan

dapat memproduksi aktiva yang cukup untuk membayar kewajibannya. Sehingga, kreditor lebih memperhatikan pada nilai terendah dari *earning* dan aktiva bersih yang dimiliki perusahaan di akhir periode. Sementara, manajemen tentu berkepentingan terhadap semakin tingginya nilai *earning* dan aktiva bersih yang dapat dihasilkan perusahaan, karena hal tersebut menentukan tingkat kompensasi mereka.

Dalam menilai sebuah kontrak hutang, yang menjadi perhatian utama dari kreditor adalah kemungkinan perusahaan memiliki cukup aktiva bersih untuk memenuhi kewajibannya. Nilai masa depan dari aktiva bersih perusahaan tidak dapat diverifikasi kepastiannya sehingga tidak diikutsertakan dalam penilaian kontrak hutang. Watts (2003) mengargumentasikan bahwa dalam kasus terjadinya hutang yang tidak dapat dipenuhi perusahaan, kurator (pihak yang menengahi dan menyelesaikan pembagian aktiva perusahaan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai urutan prioritasnya) menggunakan akuntansi konservatif dalam mengestimasi nilai aktiva perusahaan untuk dibagikan kepada pihak terkait. Dalam hal ini kurator menghitung semua kemungkinan kerugian yang ditanggung perusahaan dan tidak sedikitpun mengakui keuntungan yang tidak dapat diverifikasi.

Selain itu, bukti lain yang menunjukkan bahwa kontrak hutang mengikuti prinsip konservatisme adalah tidak dimasukkannya nilai aktiva tidak berwujud dalam penghitungan nilai minimum aktiva bersih yang harus dimiliki perusahaan agar dapat memenuhi kewajibannya dari kontrak hutang tersebut. Hal itu disebabkan karena nilai aktiva tidak berwujud tidak dapat diverifikasi, seperti *goodwill*.

Dalam kasus kontrak kompensasi manajemen, manajemen umumnya memiliki superioritas informasi dibandingkan stakeholder perusahaan lainnya dalam hal kebijakan perusahaan serta efeknya terhadap arus kas di masa yang akan datang. Jika dalam kontrak kompensasi tidak dipersyaratkan adanya verifikasi yang lebih tinggi dalam pengakuan keuntungan yang dijadikan dasar pemberian bonus bagi manajemen maka

manajemen dapat melakukan tindakan manipulatif dengan memberikan estimasi nilai arus kas di masa yang akan datang secara berlebihan.

Terbatasnya masa jabatan manajemen serta terbatasnya tanggung jawab yang dapat dibebankan pada manajemen merupakan faktor pemicu yang paling penting dalam penerapan konservatisme pada kontrak kompensasi. Hal itu disebabkan pemulihan kondisi perusahaan dari kerugian yang dialami akibat kelebihan pemberian bonus dan investasi akan sulit dilakukan perusahaan jika manajer meninggalkan perusahaan sebelum arus kas hasil estimasi dari investasi yang menjadi kebijakan manajer tersebut dapat terealisasi. Selain itu, tindak kecurangan yang dilakukan manajemen dengan memanipulasi estimasi arus kas akan sulit dibedakan dengan kerugian yang dapat dialami akibat risiko bisnis perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penerapan konservatisme dalam kontrak kompensasi berupa persyaratan tingkat verifikasi yang lebih tinggi terhadap keuntungan daripada kerugian merupakan solusi terbaik bagi perusahaan untuk menjaga tindakan manajemen agar sesuai dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan.

Konservatisme merupakan sistem dan mekanisme yang paling efektif untuk mengatur berbagai kontrak perusahaan dengan berbagai pihak agar tetap sejalan dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan dan melindungi kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak dengan perusahaan. Watts (2003) merangkum berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan prinsip konservatisme dalam berbagai kontrak yang dibuat oleh perusahaan, diantaranya adalah :

- Pada kontrak jaminan hutang, konservatisme mengurangi kemungkinan manajemen membatalkan investasi perusahaan pada proyek dengan nilai NPV positif, melebih-lebihkan nilai aktiva dan *earning* yang dilaporkan perusahaan dan membuat mekanisme pemberian dividen yang efektif kepada para pemegang saham tanpa mengorbankan kepentingan kreditor.

- Pada kontrak kompensasi, konservatisme mengurangi kemungkinan adanya upaya manajemen untuk melebih-lebihkan nilai aktiva bersih dan *earning* demi keuntungan pribadinya.
- Dalam tata kelola perusahaan, konservatisme memberikan sinyal dalam penyelidikan adanya proyek dengan NPV negatif dan memberikan kesempatan bagi pengelola perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian.

Pada akhirnya, peningkatan nilai perusahaan yang disebabkan oleh penerapan prinsip konservatisme memberikan tambahan kesejahteraan bagi seluruh *stakeholder* perusahaan.

II.2.2 Konservatisme dan Kontrak Utang

Dalam perjanjian kontrak utang, pada umumnya kreditor mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu sebagai *covenant* atas utang yang diberikan. Hal tersebut dilakukan agar kreditor memperoleh jaminan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Umumnya *Debt Covenant* tersebut berpedoman pada angka ataupun rasio akuntansi, seperti *debt to equity*, *debt to asset*, dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan kontrak utang, Watts dan Zimmerman (1990) mengajukan teori mengenai *debt/equity hypothesis*. Teori tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *debt to equity* sebuah perusahaan, semakin besar probabilitas manajer perusahaan tersebut menggunakan metode akuntansi yang lebih optimis untuk meningkatkan nilai laporan laba. Hal tersebut disebabkan semakin tingginya rasio *debt equity* perusahaan, maka semakin dekat perusahaan pada batas minimal rasio yang dipersyaratkan dalam kontrak utang. Semakin ketat batas yang dipersyaratkan dalam kontrak utang, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak utang. Dalam situasi tersebut, manajer yang memilih metode akuntansi yang lebih optimis akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar kontrak utangnya dan menghindari perusahaan dari biaya renegosiasi kontrak utang.

Berbeda dengan *debt to equity hypothesis*, Ahmed, et al (2000) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, yang menunjukkan semakin besarnya klaim kreditur terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin tinggi konflik kepentingan antara *bondholder* dan *shareholder*. Kreditur yang ingin memperoleh jaminan bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajibannya akan memberikan persyaratan kepada perusahaan berupa restriksi atas pembayaran dividen baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjanjian kontrak utang (Smith dan Warner, 1979 ; Healy dan Palepu, 1990).

Restriksi langsung diterapkan dengan membatasi jumlah maksimum pemberian dividen kepada pemegang saham (Begley, 1994). Sementara, restriksi tidak langsung diterapkan dengan menetapkan besar rasio tertentu pada neraca yang harus dipertahankan perusahaan. Dalam hal ini, pengukuran akuntansi sangat mempengaruhi kebijakan pembatasan dividen dalam kontrak utang perusahaan. Dalam kaitannya dengan praktek akuntansi konservatif, penerapan prinsip tersebut akan mengurangi kemungkinan perusahaan memberikan pembayaran dividen yang berlebih kepada para pemegang saham. Oleh karena itu kreditur akan mensyaratkan penggunaan akuntansi konservatif pada perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi.

Penelitian ini akan menguji secara empirik teori mengenai *debt to equity hypothesis*. Qiang (2003) dan wydia (2004) menggunakan proksi *leverage* rasio total utang terhadap total aktiva (Debt/Total Asset) untuk membuktikan teori *debt to equity hypothesis* secara empirik. Namun, wydia (2004) tidak dapat membuktikan teori tersebut. Dalam penelitian ini akan digunakan proksi *leverage debt to equity ratio*.

H₂: Terdapat hubungan negatif antara rasio *debt to equity* terhadap penerapan akuntansi konservatif.

II.2.3 Litigation

Ball et al, (1999) dan (2000) menyatakan bahwa lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan dalam

kebijakan manajer dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaannya (Juanda, 2007, p.6-7). Dalam hal ini, manajer akan menyeimbangkan biaya litigasi yang akan timbul dengan manfaat yang diperoleh dari pelaporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang agresif. Sehingga, perusahaan yang beroperasi pada wilayah dengan lingkungan hukum yang ketat akan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif.

Manajer harus lebih berhati-hati dan mencermati kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaannya. Karena, sedikit kesalahan dalam penggunaan kebijakan akuntansi di wilayah hukum tempat perusahaan beroperasi dapat berpotensi menimbulkan tuntutan hukum serta biaya litigasi yang harus ditanggung perusahaan. Dalam prakteknya, kesalahan dalam memperkirakan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan berpotensi lebih tinggi menimbulkan tuntutan hukum dibandingkan kesalahan dalam memperkirakan kemungkinan kerugian yang dialami perusahaan. Kellog (1984) menemukan bahwa pernyataan laba atau aset yang berlebihan lebih cenderung menyebabkan tuntutan hukum daripada pernyataan laba atau aset yang lebih rendah dengan rasio 13:1 (Watts, 2003, p.216).

Juanda (2007) menyatakan bahwa Risiko litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh *stakeholder* perusahaan yang merasa dirugikan. Dalam penelitiannya, Juanda menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas sebagai proksi dari risiko keuangan perusahaan. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa semakin kecil nilai rasio yang dimiliki sebuah perusahaan semakin rendah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang lancarnya. Sehingga, semakin besar kemungkinan perusahaan terkena tuntutan hukum. Dalam kondisi tersebut, Juanda (2007) menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung menerapkan akuntansi konservatif untuk menghindari risiko litigasi yang lebih besar. Berdasarkan penelitian Juanda (2007), studi ini menggunakan proksi rasio likuiditas untuk menangkap pengaruh risiko litigasi terhadap penerapan akuntansi konservatif.

H₃: Risiko litigasi memiliki hubungan positif dengan penerapan akuntansi konservatif

II.2.4 Political Cost

Biaya politis muncul akibat adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengalihkan kekayaan perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai laporan laba untuk menghindari biaya politik yang besar. Hal tersebut disebabkan dalam proses pengalihan kekayaan perusahaan kepada kepentingan publik, pemerintah menggunakan informasi-informasi berbasis akuntansi. Wydia (2004) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar perhatian pemerintah terhadapnya dan semakin besar kemungkinan untuk diatur. Dalam hal ini, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan pemerintah dalam setiap undang-undang yang ditetapkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, biaya politis seringkali diproksikan dengan ukuran perusahaan. Lasdi (2008) menggunakan proksi *sales growth* dalam melihat ukuran perusahaan, sementara Belkoui dan Karpik (1989) dan Wydia (2004) menggunakan proksi *net sales*. Penelitian ini menggunakan proksi yang sama dengan kedua penelitian tersebut, yakni *net sales*.

H₄: Perusahaan dengan biaya politis yang besar cenderung memilih akuntansi konservatif